

Kerja Sama Indonesia dengan Tiongkok dalam Sektor TTI (*Trade, Tourism, Investment*) di Era Pemerintahan Joko Widodo 2014-2019

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

Muhammad Hilmi Adani

19323101

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

Kerja Sama Indonesia dengan Tiongkok dalam Sektor TTI (*Trade, Tourism, Investment*) di Era Pemerintahan Joko Widodo 2014-2019

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

Muhammad Hilmi Adani

19323101

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Kerja Sama Indonesia dengan Tiongkok dalam Sektor TTI (*Trade, Tourism, Investment*) di Era Pemerintahan Joko Widodo 2014-2019

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal
23 Juni 2023

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Gustrieni Putri, S.IP., M.A.

Gustrieni Putri

2. Muhammad Zulfikar Rakhmar, B.A., M.A., Ph.D.

Muhammad Zulfikar Rakhmar

3. Willi Ashadi, S.H.I., M.A.

Willi Ashadi

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 23 Juni 2023



Muhammad Hilmi Adani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR	vi
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Argumen Sementara	12
1.8 Metode Penelitian	13
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	13
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	13
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	13
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	14
1.9 Sistematika Pembahasan	14
BAB II HUBUNGAN TTI INDONESIA DAN TIONGKOK SEBELUM PEMERINTAHAN JOKO WIDODO	15
2.1. Hubungan Indonesia dan Tiongkok sebelum pemerintahan Joko Widodo	15
2.1.1 <i>Sejarah Hubungan Indonesia-Tiongkok</i>	15
2.1.2 <i>Kerjasama TTI Indonesia-Tiongkok sebelum 2014</i>	18
2.1.2.1 <i>Kerjasama Perdagangan</i>	18
2.1.2.2 <i>Kerjasama Pariwisata</i>	19
2.1.2.3 <i>Kerjasama Investasi</i>	
BAB III HUBUNGAN TTI INDONESIA DAN TIONGKOK PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO	27
3.1. Hubungan TTI Indonesia dan Tiongkok ditinjau dari teori dependensi dimana negara dibagi menjadi <i>center-periphery</i>	27
3.1.1 <i>Negara Periferi sebagai pusat ekstraksi komoditas primer sekaligus pasar barang sekunder Pusat</i>	
3.1.2 <i>Ketergantungan Periferi akibat perkembangan teknologi oleh Pusat</i>	32
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	45
4.2 Rekomendasi	47
DAFTAR PUSTAKA	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perdagangan Global Indonesia 2013.....	19
Tabel 2. Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia (2011-2013).....	21
Tabel 3. Komoditas ekspor antara Indonesia dan Tiongkok (2014-2016).....	27
Tabel 4. Komoditas impor antara Indonesia dan Tiongkok (2014-2016).....	29
Tabel 5. Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia (2016-2018).....	42

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. PDP-PPP Amerika dan Tiongkok.....	33
Grafik 2. Nilai transaksi perdagangan internasional Indonesia	34
Grafik 3. Nilai ekspor internasional Indonesia	35
Grafik 4. Nilai proyek investasi asing di Indonesia.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Teori Dependensi.....	10
Gambar 2. Komoditas ekspor antara Indonesia dan Tiongkok (2019).....	30

DAFTAR SINGKATAN

ACFTA	: <i>ASEAN China Free Trade Area</i>
ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
AIIB	: <i>Asian Infrastructure Investment Bank</i>
APEC	: <i>Asia Pacific Economic Cooperation</i>
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASEAN	: <i>Association of South East Asian Nations</i>
BPS	: Badan Pusat Statistik
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BRI	: <i>Belt and Road Initiative</i>
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DNI	: Daftar Negatif Investasi
FDI	: <i>Foreign Direct Investment</i>
G30S/PKI	: Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia
GDP-PPP	: <i>Gross Domestic Product - Purchasing Power Parity</i>
HSR	: <i>High-Speed Rail</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
ITC	: <i>International Trade Centre</i>
KEPPRES	: Keputusan Presiden
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
MP3EI	: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
OECD	: <i>Observatory of Economic Complexity</i>
OBOR	: <i>One Belt One Road</i>
OECD	: <i>Organisation for Economic Cooperation and Development</i>
PDB	: Pendapatan Domestik Bruto
PMA	: Penanaman Modal Asing
PPh	: Pembebasan Pajak Penghasilan
RRC	: Republik Rakyat Cina
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDM	: Sumber Daya Manusia
TTCR	: <i>Travel and Tourism Competitiveness Ranking</i>
TTI	: <i>Trade, Tourism, Investment</i>
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
UNCTAD	: <i>United Nations Conference on Trade and Development</i>
WEF	: <i>World Economic Forum</i>
WITS	: <i>World Integrated Trade Solution</i>

ABSTRAK

Pembangunan merupakan pondasi penting dalam perkembangan suatu negara. Indonesia sebagai negara berkembang berusaha untuk memperbaiki beberapa sektor yang masih kurang. Perdagangan, pariwisata, dan investasi atau yang disebut TTI merupakan lini penting yang tak luput dari sorotan presiden Joko Widodo pada periode 2014-2019. Hal ini juga akibat dari arah kebijakan pemerintahan sebelum Joko Widodo yang belum berfokus pada pembangunan infrastruktur. Seiring dengan kebangkitan Tiongkok, Indonesia mencoba mengambil kesempatan untuk lebih mempererat hubungan yang sebelumnya pasang-surut. Hal ini dicerminkan dengan berbagai agenda politik yang dicanangkan pada masa pemerintahannya, seperti pembuatan Nawacita, komitmen BRI, AIIB, hingga pembuatan relaksasi kebijakan bertahap bagi para investor. Penelitian ini akan berupaya menganalisis ketergantungan Indonesia yang terjadi kepada Tiongkok menggunakan teori '*dependencia*' oleh Raul Prebisch dengan menggunakan metode kuantitatif. Ia menyebutkan ada parameter dari terjadinya ketergantungan yaitu, negara Periferi sebagai pusat ekstraksi komoditas primer sekaligus pasar barang sekunder Pusat dan ketergantungan Periferi akibat perkembangan teknologi oleh Pusat. Defisit neraca perdagangan, ketimpangan ekspor primer dan impor sekunder, serta kemajuan inovasi dan teknologi di Indonesia terhadap Tiongkok membuktikan bagaimana Indonesia selaku periferi perlahan masuk ke dalam dominasi Tiongkok sebagai negara pusat sepanjang era pemerintahan Joko Widodo yang pertama.

Kata kunci: TTI, Joko Widodo, Indonesia, Tiongkok, Teori dependensi

ABSTRACT

Development serves as a crucial foundation for the progress of a nation. Indonesia, as a developing country, strives to improve several sectors that are still lacking. Trade, tourism, and investment, commonly referred to as TTI, are important areas that have not escaped the attention of President Joko Widodo during his tenure from 2014 to 2019. This is also a consequence of the policy direction of the previous government, which did not prioritize infrastructure development. Alongside China's rise, Indonesia seeks to seize the opportunity to strengthen its previously fluctuating relationship with China. This is reflected in various political agendas implemented during President Widodo's administration, such as the formulation of Nawacita, commitments to the Belt and Road Initiative (BRI) and the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), as well as the gradual relaxation of policies for investors. This research aims to analyze Indonesia's dependency on China using Raul Prebisch's 'dependency' theory, employing a quantitative methodology. Prebisch suggests that the parameters of dependency include the peripheral country acting as the center for the extraction of primary commodities and the secondary market for central countries, as well as the peripheral country's dependency resulting from technological advancements by central countries. The trade balance deficit, the imbalance between primary exports and secondary imports, as well as the progress of innovation and technology in Indonesia vis-à-vis China, demonstrate how Indonesia, as a peripheral country, gradually falls under China's dominance as a central country throughout President Joko Widodo's first term.

Keywords: TTI, Joko Widodo, Indonesia, China, Dependency Theory

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, hubungan antara Indonesia dan Tiongkok terlihat semakin menguat setiap tahunnya. Melihat performa ekonomi Indonesia yang kurang signifikan, kebutuhan akan investasi besar dalam pembangunan infrastruktur telah mendorong Indonesia untuk melakukan kerja sama ekonomi yang intensif dengan berbagai mitra, terkhusus Tiongkok. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan rantai pasok Indonesia baik secara domestik maupun global. Merujuk pada laporan dari *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* pada tahun 2015, lambatnya performa ekonomi Indonesia adalah akibat dari krisis finansial Asia yang telah lama berlalu. Lebih lanjut, investasi pada infrastruktur menurun drastis dari sekitar 9% PDB pada pertengahan tahun 1990-an menjadi hanya 2% pada tahun 2001. Meskipun sedikit meningkat menjadi 4% pada tahun 2014, tingkat ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebesar 6%-7% (OECD 2015).

Indonesia memiliki daya tarik bagi investor asing karena terletak di kawasan yang dinamis, memiliki pasar internal yang besar, SDM kelas menengah yang berkembang, serta sumber daya alam yang melimpah. Berbagai perumusan kebijakan pemerintah yang komplementer mulai dicanangkan karena mekanisme investasi Indonesia yang masih rumit. OECD melalui laporannya pada tahun 2016 menegaskan bahwa liberalisasi *Foreign Direct Investment (FDI)* atau Investasi

Asing Langsung sangat krusial dalam menciptakan iklim pertumbuhan suatu negara. Dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, kontribusi investasi asing langsung di Indonesia masih terbatas. Walaupun secara garis besar bertransformasi dalam tren positif seperti relaksasi kebijakan investasi dan pencabutan batas kepemilikan asing dalam beberapa bisnis baru, OECD menyayangkan sulitnya izin kepemilikan usaha dan tanah investor asing di Indonesia. Hal ini dapat menghambat potensi peningkatan produktivitas ekonomi karena kurangnya diversifikasi investasi di Indonesia (OECD 2016).

Sektor pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan negara yang signifikan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan iklim tropis, memiliki ketertarikan sendiri bagi turis asing. Khususnya Bali sebagai pulau yang paling terkenal di mancanegara. Performa sektor pariwisata Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Merujuk pada laporan *Travel and Tourism Competitiveness Ranking* (TTCR) yang ditulis oleh *World Economic Forum* (WEF), pada 2017 Indonesia naik 8 peringkat sejak 2015 ke posisi 42 dunia dan terus naik hingga posisi 40 dari 140 negara pada tahun 2019. Tiongkok sendiri telah menjalin hubungan sosial sejak lama dengan Indonesia. Setelah dilakukan pemulihan hubungan diplomatik pada tahun 1990, kedua belah pihak perlahan mulai mengembangkan banyak interaksi *people to people*. Perjanjian pariwisata bilateral pada awal tahun 2000 membantu meningkatkan perjalanan antara kedua negara, sehingga wisatawan dari Tiongkok sudah mencapai 11 persen dari total wisatawan asing yang datang ke Indonesia pada tahun 2015. Keputusan pemerintah pada November 2014 dalam memberikan akses bebas visa bagi warga negara Tiongkok untuk masuk ke Indonesia berdampak pada peningkatan jumlah pengunjung dari

Tiongkok lebih lanjut. Dalam bidang pendidikan, Tiongkok telah mensponsori sejumlah program beasiswa dan pertukaran. Minat Indonesia dalam pendidikan Tiongkok telah meningkat selama 15 tahun terakhir, dengan jumlah siswa Indonesia yang belajar di Tiongkok meningkat dengan pesat dari sekitar 1.000 siswa pada tahun 1998 menjadi 15.000 siswa pada tahun 2015. Kendala bahasa masih menjadi hambatan dalam interaksi antar-individu, terutama jika dibandingkan dengan hubungan dengan Amerika Serikat, dimana penggunaan bahasa Inggris masih lebih luas dibandingkan dengan bahasa Mandarin di Indonesia. Jika dibandingkan dengan kedalaman dan luasnya interaksi antara Indonesia dan Amerika Serikat, hubungan antar-individu dengan Tiongkok masih memiliki jarak yang cukup jauh (Hamilton-Hart and McRae 2015, 15).

Sorotan dunia memasuki abad ke-21 tertuju pada sebuah negara yang perkembangannya tak dapat dibendung. Republik Rakyat Cina (RRC) atau *Mainland China* (Cina Daratan) yang lebih akrab disebut Tiongkok kini telah bertransformasi dari negara berkembang di tahun 90-an menjadi kekuatan global. Sebagai negara dengan populasi terbanyak serta ekonomi kedua terbesar di dunia, mendapatkan predikat hegemoni dan menggeser dominasi Amerika sebagai pemenang Perang Dingin beserta ideologi-ideologinya sangatlah mungkin. Sejak diberlakukannya reformasi ekonomi serta kebijakan baru oleh Deng Xiaoping pasca era revolusioner komunis Mao Zedong yang tertutup dari hubungan internasional, Tiongkok secara bertahap mengalami kemajuan di bidang ekonomi yang lalu merambah ke berbagai bidang lainnya. Negara yang dahulu mengandalkan perputaran ekonomi melalui bidang agrikultur, kini telah terindustrialisasi menjadi pusat manufaktur terbesar dunia. Kebangkitan Tiongkok

sebagai kekuatan ekonomi dunia baru ketika memasuki abad ke-21 ini merupakan implikasi dari berbagai hal seperti strategi dominasi negara pada perusahaan-perusahaan di sektor strategis, industrialisasi yang bertahap, kapitalisasi sistem ekonomi, kebijakan luar negeri berbasis *sovereign wealth fund*, serta kekuatan militer yang terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Melalui gagasan bung Hatta ‘mendayung diantara dua karang’ atau politik bebas-aktifnya, serta pemantapan posisi Indonesia sebagai negara non-blok telah menciptakan fleksibilitas Indonesia dalam hubungan internasional baik berupa bilateral maupun multilateral. Hal ini membuka pintu penetrasi Tiongkok sebagai negara maju sebesar-besarnya ke Indonesia, yang secara perlahan masuk dan mempengaruhi berbagai dinamika yang terjadi baik dalam ranah domestik maupun ranah internasional (Qomara 2015, 31-35).

Kebangkitan Tiongkok yang pesat merupakan fenomena yang tak terelakkan. Indonesia sebagai negara berkembang lantas tak dapat mengabaikan pengaruh dan potensi yang dimiliki oleh Tiongkok, terutama di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Naiknya presiden Indonesia ke-8 setelah memenangkan pemilu 2014 telah memberikan warna baru bagi Indonesia. Sebagai pemimpin yang populis, janji kampanye beserta kebijakannya terkesan pro terhadap kesejahteraan rakyat. Hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi-misi yang disebut Nawacita. Dalam sektor ekonomi sendiri, ambisi untuk menciptakan pemerataan ekonomi menjadi visi-misi yang tertulis jelas dalam rencana-rencananya. Sepanjang masa presidensi pertama Joko Widodo, Tiongkok menjadi mitra strategis utama Indonesia dalam perdagangan dan infrastruktur. Sikap pemerintah

tersebut dapat dilihat dari kunjungan ke Tiongkok pada KTT APEC 2014 sebagai lawatan perdana setelah naik ke kursi presiden dan kunjungan ke Beijing pada peringatan hubungan diplomatik kedua negara yang ke-65 pada tahun 2016. Ini juga didukung dengan komitmen Indonesia dalam mendukung dua instrumen dominasi Tiongkok; proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) dan penganangan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB). Disamping itu, hubungan Indonesia-Tiongkok merupakan dua poros yang asimetris. Hal ini karena ketergantungan Indonesia yang semakin kuat terhadap Tiongkok hingga menciptakan ketimpangan ekonomi. Fenomena ini dapat dilihat dari semakin lemahnya neraca perdagangan Indonesia terhadap Tiongkok di angka -\$13 juta hingga -\$14 juta sepanjang 3 tahun awal kepemimpinan presiden Joko Widodo berdasarkan data dari *International Trade Centre* (ITC). Kerangka pemikiran dependensi sangat komplementer dengan fenomena-fenomena yang terjadi antara Indonesia dan Tiongkok selama era Presiden Joko Widodo yang pertama. Khususnya, jika dianalisis dalam lingkup TTI (*Trade, Tourism, Investment*) antara kedua negara.

Dinamika hubungan Indonesia dengan Tiongkok memiliki implikasi signifikan karena kedekatannya. Indonesia tentu mengharapkan pembangunan yang maksimal sebagai realisasi RPJMN 2015-2019. Namun, hal tersebut tak luput dari pengaruh buruk yang diberikan dalam kerangka '*dependencia*' yang telah terjadi di Indonesia. Melalui tulisan ini penulis akan mengupas dominasi Tiongkok di Indonesia dalam perdagangan, pariwisata, dan Investasi (TTI).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kerjasama TTI Indonesia dan Tiongkok ditinjau dalam perspektif teori dependensi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, menjelaskan bagaimana kerjasama TTI Tiongkok dan Indonesia tahun 2014-2019

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini memulai cakupan dari Tahun 2014 karena merupakan awal pemerintahan presiden Joko Widodo diiringi dengan bertambahnya intensitas hubungan antara kedua negara. Hal ini ditelaah dari arah kebijakan Indonesia melalui RPJMN 2015-2019 dengan visi-misi Nawacita. Ini merupakan kelanjutan dari keikutsertaan Indonesia di dalam OBOR yang bertransformasi menjadi BRI serta penganangan AIIB yang terimplementasi optimal pada masa pemerintahannya serta kerjasama lainnya dalam lingkup TTI. Dengan melihat perubahan-perubahan dalam kebijakan luar dan dalam negeri serta kerja sama yang tercipta secara bilateral, multilateral dan regional maupun reaksi antara kedua pihak saat terjadinya konflik, dapat menemukan titik dominan dan dependen antara kedua negara. Limitasi penelitian adalah tahun 2019, dimana pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir. Karenanya, penulis tidak mengambil rentang waktu di atas tahun 2019.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis ingin menghadirkan serta mengelaborasi ragam tulisan yang berhilir pada hubungan TTI Indonesia dengan Tiongkok secara umum yang didasari pada ketergantungan Indonesia terhadap Tiongkok. Dalam buku karya Prof. Dr. Bambang Cipto M.A. yang berjudul “*Strategi China Merebut Status Super Power*”, beberapa faktor yang dapat menciptakan dominasi baru dalam kancah global. Mendalami riset pada sub bab ekonomi, apa yang dikenal dengan ‘*New World Order*’ atau tatanan dunia baru sebagai produk pemenang perang titisan Amerika lambat laun memudar. Kemunduran ini adalah implikasi dari meningkatnya poros lain seperti Rusia dan Tiongkok pada panggung kontestasi hubungan internasional. Bambang berpendapat bahwa status tersebut dapat diraih bila 4 elemen dasar yaitu, ekonomi, militer, politik, dan budaya telah didominasi. Elemen ekonomi menjadi pemegang peranan penting karena merupakan basis terbentuknya banyak institusi dan proyek yang sampai hari ini memantapkan fungsi diplomasi Tiongkok seantero dunia. Hal ini menciptakan interdependensi ekonomi dari ujung Asia hingga wilayah Eropa dan Timur Tengah. Tak lupa, masifnya partisipasi aktor global ini bermunculan akibat pengalaman di masa krisis ekonomi pada tahun 2008 dimana Tiongkok mampu menjaga stabilitas ekonominya. Pun, mendukung para negara terdampak dengan pinjaman dana yang tak kecil jumlahnya. Menggunakan strategi imitator, Tiongkok mampu bertransformasi menjadi inovator di tengah krisis, layaknya Amerika dahulu pasca perang (Cipto 2018). Namun buku tersebut belum menjelaskan ketergantungan Indonesia setelah Tiongkok berhasil berkembang pesat di abad ke-21.

Narasi yang sama juga diutarakan oleh perdana menteri pertama Singapura, Lee Kuan Yew. Mengkaji buku "*Lee Kuan Yew: The Grand Master's Insights on China, the United States, and The World*" karya Henry A. Kissinger, dominasi Tiongkok untuk merangkul dunia dalam rangka untuk menjadi kekuatan global yang baru adalah tujuan utamanya. Menurutnya, pencanangan OBOR yang berubah menjadi proyek BRI adalah bukti kehendak Tiongkok untuk mengembalikan kejayaan historisnya. Secara bahasa pun, Tiongkok berarti 'Kerajaan Tengah'. Slogan yang selalu diangkat adalah pembangunan kemakmuran bersama tanpa memandang negara itu besar ataupun kecil. Institusi internasional menjadi alat diplomasi yang tepat dalam apa yang mereka sebut sebagai 'kebangkitan damai' ini. Dimana, AIIB sebagai salah satu instrumen penetrasi dependensi di Indonesia hadir untuk mengimbangi dominasi IMF dan Bank Dunia. (Kissinger, 2017). Namun, buku tersebut belum menegaskan tanggapan Indonesia terhadap kebangkitan Tiongkok atau '*rising China*'.

Tulisan Tyas Dian Anggraeni dalam jurnal *RechtsVinding* berjudul "*Menyambut Kelahiran Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*" mempertegas peran AIIB yang lebih besar khususnya terhadap Indonesia dibandingkan pendahulunya, *Asian Development Bank (ADB)*. Sesuai dengan namanya, proyek-proyek infrastruktur dan sejenisnya merupakan investasi utama Tiongkok dalam AIIB. Lebih lanjut, lembaga keuangan ini memiliki beberapa cakupan lainnya seperti industri, komunikasi, energi dan transportasi. Sedangkan ADB lebih diimplementasikan sebagai alat diplomasi budaya Tiongkok dengan cakupan pembangunan pendidikan dan beberapa infrastruktur penunjang. Indonesia sebagai yang disebut Tiongkok sebagai '*potential founding member*'

pada pengesahan *Memorandum of Understanding* atau MoU AIIB yang ditandatangani oleh 21 negara lainnya saat pendirian lembaga keuangan tandingan IMF ini pada bulan Oktober 2014 diberikan keluwesan waktu untuk menandatangani berhubung tengah mengalami transisi kekuasaan dari presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke presiden terpilih Joko Widodo (Anggraeni, 2015). Namun tulisan ini hanya berfokus pada AIIB saja.

Dalam jurnal berjudul “*Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan?*”, penulis menjabarkan arus investasi Tiongkok yang kian menggunung dari tahun 2016-2017. Penulis mengkomparasikan peningkatan hubungan antara kedua negara di tengah konflik yang tengah berlangsung di Natuna. Juga bagaimana investasi tetap tumbuh karena kepentingan masing-masing dan MoU pada perayaan 65 tahun hubungan bilateral Tiongkok-Indonesia (Andika and Aisyah 2017, 161-179). Namun, tulisan tersebut tidak berfokus pada faktor ekonomi.

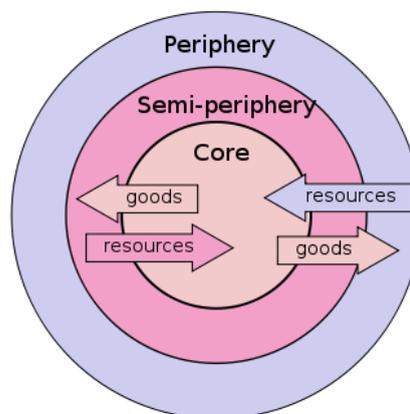
Buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah diatas telah banyak membahas mengenai kebangkitan Tiongkok dan proyek raksasa BRI beserta institusi lainnya dalam kancah regional maupun global. Namun, pembahasan mengenai ketergantungan Indonesia pasca lahirnya institusi-institusi tersebut belum diurai, terkhusus melalui pendekatan dalam penelitian ini yaitu *dependency theory*. Dengan menggunakan teori dependensi, penelitian ini akan menganalisis, mengidentifikasi, serta menyempurnakan kekurangan dari penelitian sebelumnya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Teori merupakan alat rasionalisasi untuk menjelaskan suatu paradigma. Lebih lanjut, Kurt Pawlik dan Mark R. Rosenzweig menjelaskan bahwa teori dibentuk sebagai dasar penjelasan tentang fenomena yang lebih tervalidasi daripada firasat, perkiraan dan hipotesis yang disusun baik dalam pernyataan formal maupun matematis. Stam juga menekankan bahwa teori dapat mereduksi atau mengerucutkan pandang atas suatu observasi untuk melakukan sesuatu yang benar-benar ada di dunia (Pawlik and Rosenzweig 2000, 551-552). Untuk menjawab rumusan masalah dan menganalisis data yang ada, penulis menggunakan teori dependensi dari pemikir Raul Prebisch (1901-1986) yang merupakan salah satu dari pilar perkembangan diskusi terkait '*dependencia*' atau ketergantungan yang memiliki 2 poin utama dalam rumusan *center-periphery*.

1. Negara Periferi sebagai pusat ekstraksi komoditas primer sekaligus pasar barang sekunder Pusat
2. Ketergantungan Periferi akibat perkembangan teknologi oleh Pusat

Gambar 1. Teori Dependensi



Sumber: Sociology Article

Pada awalnya, konsep ketergantungan merupakan suatu teori yang dipergunakan untuk menjelaskan mengenai terjadinya keterbelakangan di Amerika Latin yang muncul sebagai implikasi dari transfer surplus multisektoral yang dilakukan dari daerah terbelakang menuju daerah yang maju. Teori ini menyatakan bahwa perlambatan serta kesenjangan ekonomi dan sosial di negara terbelakang merupakan hasil dari ‘kapitalisme baru’ berbentuk monopoli modal asing yang kemudian menciptakan kecenderungan jangka panjang dalam neraca perdagangan. Ketimpangan antara harga produk primer dengan harga produk manufaktur menjadi bukti dari terjadinya ketergantungan (Edelstein 1981, 103).

Teori dependensi Raul Prebisch kemudian berkembang dan dikenal dengan istilah ‘*center-periphery*’. Sistem ekonomi internasional dipandang sebagai pusat industri yang mendominasi negara-negara terbelakang atau periferi yang mayoritas melakukan ekspor non-manufaktur. Meskipun posisi relatif ‘pusat’ dan ‘periferi’ dapat berubah, teori ini menegaskan adanya hubungan hegemonik dalam satu sistem ekonomi antara satu dan lainnya. Tak hanya diadopsi oleh para pengikut tradisi teori ketergantungan di Amerika Latin yang berasal langsung dari Prebisch, konsep ini merupakan landasan yang kemudian diadopsi oleh penulis non-Latin Amerika seperti Arghiri Emmanuel, Andre Gunder Frank, Immanuel Wallerstein, Johan Galtung, dan Samir Amin. Teori ini mengembangkan ide pertukaran yang tidak seimbang antara kedua elemen, di mana pusat memperoleh sebagian kekayaannya dari periferi, terlepas dari kemajuan teknologi yang dihasilkan oleh pusat (Love 1980, 45-46). Lebih lanjut, Prebisch mengamati bahwa negara terbelakang adalah eksportir bahan-bahan primer ke negara pusat, sedangkan negara pusat merupakan eksportir

barang-barang sekunder. Dengan teknologi maju dan kemampuan monopoli sistematis kerja, negara pusat dapat mempertahankan upah dan keuntungan yang lebih besar daripada negara periferi. Pertumbuhan produktivitas di negara pusat juga diiringi oleh peningkatan upah pekerja, dimana hal ini sulit terjadi di negara terbelakang. Maka, jika keduanya meningkatkan produktivitas ekonomi bersamaan, negara periferi memiliki penurunan harga ekspor sedangkan negara pusat tidak. Negara periferi juga lebih kompetitif serta dikenal memiliki SDM yang banyak namun memiliki upah paling minimum. Sehingga peningkatan produktivitas tidak linear dengan peningkatan upah. Menurut Prebisch, perumusan kebijakan yang dinaungi oleh pemerintah terkait subsidi, perlindungan, dan pajak ekspor untuk mencegah penggunaan surplus sumber daya yang kurang efisien adalah urgensi bagi negara yang tengah mengalami ketergantungan (Baer 1962, 171-172).

Menggunakan teori dependensi Raul Prebisch sebagai pisau analisis, dapat ditelaah bahwa dalam masa pemerintahan Joko Widodo 2014-2019, arah kebijakan Indonesia banyak mengindikasikan kecondongannya terhadap Tiongkok. Hal ini tercerminkan dalam defisit neraca perdagangan Indonesia terhadap Tiongkok akibat ekspor komoditas primer yang lebih besar dari impor komoditas sekunder. Lebih lanjut pencaangan Nawacita dalam RPJMN, dukungan terhadap BRI, AIIB, hingga pemberian konsesi-konsesi yang memudahkan investor untuk masuk ke dalam Indonesia menandakan Tiongkok sebagai mitra utama dalam percepatan pengembangan infrastruktur penunjang TTI di Indonesia.

1.7 Argumen Sementara

Pada masa pemerintahan Joko Widodo, Indonesia mengalami percepatan pembangunan yang sangat tinggi dibandingkan era kepemimpinan sebelumnya, terkhusus dalam lini infrastruktur. Besarnya atmosfer kehadiran Tiongkok di Indonesia sendiri dapat dilihat secara kasat mata. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan Tiongkok dalam berbagai proyek di Indonesia baik tersiar di berita maupun tertulis dalam jurnal ilmiah. Ketergantungan Indonesia terjadi karena kebutuhan pembangunan negara untuk menjadi lebih maju, terlepas dari kurangnya kemampuan negara dalam pengadaan fasilitas ataupun teknologi tersebut. Maka, Tiongkok dihadirkan sebagai jawaban dari keresahan tersebut.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Peneliti adalah instrumen pengumpulan data utama. Peneliti meneliti mengapa peristiwa terjadi, apa yang terjadi, dan dan lebih menguraikan uraian peristiwa. Maka daripada itu, metode ini akan digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan studi kasus yang diangkat.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Indonesia dan Tiongkok. Sedangkan, objeknya adalah hubungan TTI antara Indonesia dan Tiongkok yang mana penulis berusaha untuk melihat apa yang terjadi sehingga tercipta variabel dominan dan

dependen antara keduanya.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data pustaka. Metode ini akan diterapkan dengan cara mempelajari berbagai jurnal, buku, laporan dan berita yang terkait dengan rumusan masalah. Dengan metode ini diharapkan dapat memahami alasan yang membuat Indonesia didominasi oleh Tiongkok.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan membagi antara bahan primer dan sekunder. Penulis mengambil bahan primer yang dapat diklasifikasikan sebagai laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan Tiongkok, jurnal dan buku. Sedangkan untuk bahan sekunder penulis mengklasifikasikannya sebagai laporan yang dikeluarkan oleh organisasi yang terkait dengan Indonesia dan Tiongkok, berita dan artikel yang kredibel.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab I akan diisi oleh Pendahuluan, yang terbagi menjadi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab II Pembahasan, akan membahas mengenai kebangkitan Tiongkok serta hubungan antara Indonesia dan Tiongkok dalam TTI sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bab III berisi analisis meningkatnya ketergantungannya terhadap Indonesia terhadap Tiongkok. Pada bab ini juga akan mengetahui

dominasi Tiongkok yang menciptakan hubungan ekonomi asimetris dengan Indonesia. Bab IV akan diisi oleh penutup berupa kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

HUBUNGAN TTI INDONESIA DAN TIONGKOK SEBELUM PEMERINTAHAN JOKO WIDODO

2.1. Hubungan Indonesia dan Tiongkok sebelum pemerintahan Joko Widodo

Dalam menjelaskan hubungan antara kedua negara, penulis akan menuliskan sejarah singkat relasi antara kedua negara dan menuliskan gambaran hubungan perdagangan, pariwisata, dan investasi pada masa sebelum pemerintahan Joko Widodo secara berurutan.

2.1.1 Sejarah Hubungan Indonesia-Tiongkok

Kedekatan antara Indonesia dan Tiongkok adalah hubungan yang tak dapat terelakkan. Namun, menilik ke dalam kajian historis nya. Hubungan antara Indonesia dan Tiongkok telah terjalin sejak berabad-abad yang lalu. Sebelum menjadi negara modern setelah Perang Dunia II, kedua negara berinteraksi melalui ekspedisi dan migrasi baik sebelum maupun selama periode kolonialisasi Eropa. Sebagai hasilnya, interaksi antara masyarakat adat di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Indonesia dan imigran Tionghoa sebelum pendirian negara modern masih tampak mempengaruhi hubungan kontemporer. Komunitas Tionghoa telah menjadi bagian penting dari masyarakat Indonesia sejak negara ini meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Dalam era modern, Indonesia dan Tiongkok telah mengalami hubungan yang dinamis, mulai dari menjadi sekutu dekat (1955 hingga 1966), konflik (1967 hingga 1990), hingga kemitraan yang semakin berkembang (1990 hingga 2000). Di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno, terutama dari pertengahan tahun 1950-an hingga pertengahan tahun 1960-an, Indonesia menjalin kemitraan yang sangat erat dengan Republik Rakyat

Tiongkok (RRT). Setelah mengusir nasionalis Tiongkok yang dinaungi oleh Chiang Kai-shek ke Pulau Formosa, kemerdekaan Republik Rakyat Tiongkok pun berada di depan mata. Indonesia sendiri merupakan salah satu diantara negara-negara yang pertama mengakui kedaulatan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949. Hubungan diplomatik pun terjalin setahun setelahnya pada 13 April 1950 dimana Indonesia mengakui keberadaan Tiongkok yang mendeklarasikan ibukotanya di Beijing (Fitriani 2021, 184).

Lain halnya dengan Amerika yang mengakui para nasionalis dalam Republik Tiongkok dengan ibukota Taipei hingga tahun 1970. Ini membuktikan bahwa sejak awal bahkan Indonesia telah mengakui *'one China policy'* atau kebijakan satu Tiongkok. Apa yang dikenal dengan Poros Jakarta-Peking pun tercipta berdasarkan kampanye anti-kapitalis dan anti-Barat Soekarno sebagai perlawanan atas campur tangan Amerika Serikat dalam politik domestik Indonesia. Selama periode ini, Indonesia berusaha mempertahankan posisi independen dan non-blok, tetapi terdesak kembali ke kubu negara-negara sosialis. Namun, kedekatan ini kian meluntur pasca meletusnya gerakan G30S PKI pada 30 September 1965. Dipercaya bahwa gerakan yang telah membunuh petinggi-petinggi militer Indonesia ini ditunggangi oleh PKI dari Tiongkok dan dikenal dengan peristiwa 'Gestapu'. Alhasil, pasca turunnya Presiden Ir. Soekarno melalui fenomena Supersemar, naiklah Mayor Jenderal Soeharto ke kursi kekuasaan Indonesia. Dengan mayoritas militer yang ada di lingkup pemangku kebijakan, tindakan preventif terhadap PKI pun giat dilakukan. Alhasil, sebulan setelah pemerintah Orde Baru berdiri, Indonesia membekukan hubungan diplomatiknya dengan Tiongkok. Selama lebih dari tiga dekade, rezim militer

Soeharto melarang segala bentuk hubungan dengan Tiongkok dan memutus hampir semua kontak dengan Tiongkok. Selama periode ini, pemerintahan Soeharto memantau komunitas Tionghoa dengan sangat ketat, sehingga banyak dari mereka melarikan diri kembali ke Tiongkok atau negara lain, sementara yang lain menghadapi diskriminasi yang luas mulai dari larangan praktik budaya hingga pembatasan penggunaan bahasa dan aksara Tionghoa dalam materi cetak, serta proses selektif di universitas dan instansi pemerintahan (Ibid., 185).

Hubungan diplomatik dengan Tiongkok akhirnya dimulai kembali pada 8 Agustus 1990 secara hati-hati. Pasalnya, ada ancaman kebangkitan komunisme yang masih menghantui dan berimbas pada larangan apapun yang berkaitan dengan ideologi Komunisme. Sentimen anti-Tiongkok ini banyak terjadi pada pedagang yang merasa terancam karena kedekatan Indonesia yang mulai terjalin kembali dapat menghancurkan perekonomian pribumi dan dilain pihak menguntungkan bagi etnis Tiongkok lokal. Disamping fenomena di atas, pemerintah Tiongkok tidak mengambil sikap apapun. Terutama pada kerusuhan anti-Tiongkok pada tahun 1998. Hal ini yang membuat sikap pemerintah tidak begitu menyalahkan Beijing. Salah satu momen meningkatnya hubungan antara kedua negara adalah ketika bencana Tsunami Aceh pada tahun 2004, dimana pemerintah Tiongkok adalah salah satu yang tercepat dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Lebih lanjut, kunjungan Presiden Hu Jintao ke Indonesia pada peringatan 50 tahun Konferensi Bandung semakin mempererat tali persaudaraan Indonesia-Tiongkok. Bersama presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mereka menandatangani Kemitraan Strategis antara kedua negara pada tahun 2005. Ini kemudian berlanjut pada Oktober 2013 dimana Presiden Xi Jinping dan Presiden

Yudhoyono meningkatkan kemitraan tersebut menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif dengan menyatakan dukungannya terhadap proyek One Belt One Road (Anwar 2019, 1-7).

2.1.2 Kerjasama TTI Indonesia-Tiongkok sebelum 2014

2.1.2.1 Kerjasama Perdagangan

Perdagangan internasional memiliki peran penting dalam kemajuan ekonomi global. Ini karena perdagangan internasional dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup. Perdagangan internasional memberikan kesempatan bagi suatu negara untuk menawarkan produk dan jasa yang diproduksi secara efisien dan kompetitif di pasar global. Dengan membuka pasar ke negara-negara lain, produsen dapat meningkatkan jumlah produksi, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan efisiensi. Secara jangka panjang, perdagangan internasional juga dapat membantu negara untuk meningkatkan kemampuan teknologi dan inovasi. Selain itu, perdagangan internasional juga dapat membantu menciptakan lapangan kerja. Dengan membuka pasar untuk produk-produk yang diproduksi secara efisien, perdagangan internasional dapat meningkatkan permintaan dan mendorong pertumbuhan industri. Dalam jangka panjang, pertumbuhan industri ini dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan. Perdagangan internasional juga memungkinkan negara-negara untuk meningkatkan kualitas hidup dengan akses ke barang-barang yang sulit diproduksi atau mahal untuk diproduksi di dalam negeri. Contohnya, negara yang tidak memiliki sumber daya alam tertentu dapat mengimpor bahan baku dari negara lain yang memproduksinya secara efisien,

sehingga dapat memproduksi produk yang dibutuhkan dengan biaya yang lebih rendah (Myint 1958, 318).

Tabel 1. Perdagangan Global Indonesia 2013

No	Country	Trade Balance	Export	Import	No Tarrif
1	China	-\$7,247,973.02	\$22,601,487.23	\$29,849,450.26	1
2	Singapore	-\$8,895,281.63	\$16,686,238.64	\$25,581,520.27	1
3	Japan	\$7,801,670.51	\$27,086,258.71	\$19,284,588.15	
4	United States	\$6,659,310.43	\$15,741,131.92	\$9,081,821.49	
5	Malaysia	-\$2,655,923.51	\$10,666,609.47	\$13,322,532.98	1

Sumber data: worldtrade.org

Pada tahun 2013, Bank Dunia melalui bank data *World Integrated Trade Solution* (WITS) mencatat beberapa negara yang memiliki intensitas perdagangan yang tinggi dengan Indonesia. Tiongkok menjadi salah satu yang tertinggi dengan nilai ekspor dan impor di atas \$20 juta. Namun, neraca perdagangan Indonesia terhadap Tiongkok berada di angka -\$7 juta. Ini memiliki nilai yang sangat besar menyusul Singapura dan Jepang. Perjanjian nol tarif juga diterapkan antara keduanya, dimana secara langsung memangkas biaya ekspor dan impor melalui *ASEAN China Free Trade Area* (ACFTA). Data ini cukup untuk menggambarkan seberapa besarnya posisi Tiongkok bagi Indonesia dalam perdagangan diantara negara-negara lainnya sebelum era Joko Widodo (WITS, n.d.).

2.1.2.2 Kerjasama Pariwisata

Bunghez dalam risetnya menjelaskan bahwa Secara ekonomi, pariwisata merupakan konsumen barang dan penerima manfaat jasa. Pariwisata dapat mendukung pengembangan ekonomi baik komunitas lokal maupun ekonomi negara, melalui pendapatan dari pengunjung domestik atau asing. Dukungan terbesar dari pariwisata dalam menstimulus pertumbuhan ekonomi adalah dengan

meningkatnya jumlah lapangan pekerjaan di sekitar wilayah destinasi wisata. Baik yang berbentuk resort, villa, atau taman bermain yang dikelola oleh perusahaan profesional, maupun usaha mikro kecil milik warga sekitar, semua dapat menciptakan lapangan pekerjaan sesuai kebutuhan masing-masing. Selain itu, destinasi wisata dapat memberikan pendapatan penting bagi anggaran negara dalam bentuk pajak dan biaya yang dibayarkan oleh perusahaan yang beroperasi di sekitar destinasi tersebut. Ini kemudian mendorong pertumbuhan pendapatan domestik bruto wilayah dan negara secara signifikan. Efek-efek dari pariwisata terutama tercatat dalam sektor-sektor aktivitas ekonomi yang menyediakan investasi dalam basis teknis-material pariwisata, fasilitas infrastruktur umum dan berbasis pariwisata, sektor komersial, industri ringan, industri makanan, serta sektor pemberian layanan yang bersifat umum. Pariwisata juga meningkatkan ekspor produk lokal, melalui pembelian oleh wisatawan untuk oleh-oleh, pakaian, dan souvenir. Produk-produk tersebut secara langsung mempengaruhi ekonomi lokal dan menciptakan pengalaman berbelanja yang menarik bagi wisatawan (Bunghez 2016, 3).

Sektor Pariwisata di Indonesia tentu sangat terkenal karena letak geografi yang eksotis, aneka ragam hayati, serta ragam budaya yang melekat di dalamnya. Ini menjadi sorotan investor baik nasional maupun Internasional dalam membangun wilayah pariwisata dengan bonus sumber tenaga kerja berupah murah, termasuk Tiongkok. Kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok telah berkembang pesat dalam berbagai bidang setelah hubungan diplomatik mereka dipulihkan. Menilik dari situs kedutaan Tiongkok, kedua negara telah menandatangani sejumlah dokumen untuk memperkuat pertukaran dan kerja sama

yang bersahabat di bidang-bidang seperti kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, kesehatan, militer, agama, pariwisata, komunikasi, pertanian, dan kehutanan. Pada Januari 1991, diadakan penandatanganan Perjanjian Terkait Transportasi Udara Terjadwal antara kedua negara. Ini kemudian berlanjut dengan pengesahan KEPPRES RI No. 116 Tahun 1993 oleh pemerintah Indonesia. Sejak itu, Air China, China South Airlines, dan Garuda Indonesian Airlines membuka penerbangan langsung antara kedua negara (BPK 1993). Kedua negara juga memulai program pertukaran pelajar pada tahun 1994. Pada bulan Juli 1992, dibentuklah Asosiasi Kerjasama Ekonomi, Sosial, dan Budaya Indonesia-Tiongkok. Sedangkan pada Agustus 1993, dibentuklah Asosiasi Kerjasama Ekonomi dan Budaya Tiongkok-Indonesia. Kedua asosiasi tersebut menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama. Selain itu, kedua negara juga menandatangani nota kesepahaman tentang promosi kerja sama di bidang pariwisata serta nota kesepahaman tentang kerja sama di bidang kesehatan dan olahraga. Pada bulan September 2000, Tiongkok menyetujui Indonesia sebagai tujuan wisata keluar bagi warga negara Tiongkok. Pada bulan November 2001, ditandatangani kembali Perjanjian Kerja Sama di Bidang Kebudayaan (Embassy of PRC in Indonesia 2004).

Tabel 2. Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia (2011-2013)

Kebangsaan	Tahun		
	2011	2012	2013
Singapura	1,324,839	1,324,706	1,432,060
Malaysia	1,173,351	1,269,089	1,380,686
Australia	933,376	952,717	983,911
Tiongkok	594,997	726,088	858,140

Sumber data: bps.go.id

Merujuk pada data statistik yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), walaupun wisatawan Singapura merupakan yang terbanyak, hal ini wajar karena secara geografis memiliki jarak yang sangat dekat. Tiongkok merupakan salah satu yang terbanyak diantara negara-negara wilayah Asia Pasifik lainnya, dan merupakan terbanyak ke tiga diantara negara-negara Asia. Menimbang letak geografisnya yang terlampau lebih dari 8000 km, baik jumlah per tahun maupun peningkatannya merupakan jumlah yang sangat tinggi. Variabel pembandingan terbaik adalah dengan negara tetangga, Australia yang hanya mengalami peningkatan sekitar 20.000 turis per tahun saja sepanjang tahun 2011-2013 (BPS, n.d.). Dapat disimpulkan bahwa hubungan pariwisata antara Indonesia dengan Tiongkok mengalami perkembangan dinamis bertren positif hingga sebelum Presiden Joko Widodo dilantik.

2.1.2.3 Kerjasama Investasi

Negara berkembang pada dasarnya mengalami industrialisasi yang lebih lambat dari negara-negara maju. Dalam proses perkembangan tersebut, tentu banyak diwarnai oleh polemik. Keterbatasan modal untuk membangun usaha, kurangnya pengalaman dalam penelitian untuk pengembangan teknologi, serta keterbatasan devisa untuk membeli kebutuhan pembangunan infrastruktur adalah beberapa contoh paling umum. Negara-negara dengan keterbatasan modal ini juga menginginkan basis industri yang lebih maju untuk menyerap tenaga kerja yang berlebih. Karena, dengan tercapainya modernisasi melalui industrialisasi, negara tersebut kemudian dapat mandiri. Melihat peluang tersebut, para investor di negara maju pun memaksimalkan keuntungan dengan memperluas rantai pasok global mereka melalui penanaman modal di negara-negara berkembang.

Keunggulan dalam sistem manajemen, pemasaran, pengalaman dan pembiayaan ini menarik bagi negara yang tengah melakukan modernisasi. Selain itu, mereka ingin memperoleh keuntungan dari ketidaksempurnaan dalam pasar negara berkembang, mendapatkan akses lebih dekat ke sumber bahan baku primer, serta memanfaatkan biaya produksi yang lebih rendah dan konsesi yang ditawarkan oleh negara tuan rumah yang bersedia. Ini terjadi karena untuk menarik minat investor, pemerintah di negara tuan rumah tentu merancang dan menawarkan paket insentif menarik bagi para investor asing (O'Sullivan 1985, 29)

Salah satu sektor investasi yang kurang diperhatikan sebelum era presiden Joko Widodo adalah investasi di bidang infrastruktur. Laporan dari Bank Dunia pada 2014 menggarisbawahi kurangnya investasi dalam bidang infrastruktur yang merupakan hambatan besar bagi pertumbuhan Indonesia. Ini juga memberikan efek domino pada buruknya kinerja logistik. Bank Dunia menegaskan bahwa produsen pedesaan tidak dapat bersaing dengan produsen di perkotaan di Indonesia. Kesenjangan yang terjadi merupakan implikasi dari buruknya infrastruktur penghubung antara daerah rural dan urban. Mengatasi kesenjangan infrastruktur sepenuhnya atau sebagian akan mendukung pertumbuhan dan kemakmuran di berbagai sektor pula. Investasi memang merupakan instrumen yang dapat mendukung pertumbuhan negara dan menciptakan lapangan kerja namun hanya dalam jangka pendek. Ketika investasi difokuskan pada bidang infrastruktur, peningkatan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjanglah yang akan terjadi. Karena ketika layanan infrastruktur disediakan, daya saing perusahaan meningkat dan akses penduduk terhadap layanan ditingkatkan. Maka, meningkatkan investasi di lini infrastruktur akan membawa transformasi bagi

Indonesia secara signifikan dan berkelanjutan. Tentunya didukung oleh regulasi yang jelas dari pemerintah (World Bank 2014, 82).

Dengan populasi yang besar dan kekayaan sumber daya alamnya, Indonesia menjadi tujuan yang menarik bagi investasi asing. Meskipun pendapatan per kapita masih relatif rendah, dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, Indonesia menawarkan pasar prospektif yang baik untuk penjualan barang konsumen. Karena tingkat upah yang rendah, investor dari negara-negara yang lebih maju tertarik untuk memindahkan industri mereka ke Indonesia agar lebih kompetitif di pasar dunia. Lebih lanjut, mereka dapat menjual produk mereka ke pasar domestik dan mengekspornya ke negara lain. Namun, karena kondisi ekonomi, sosial, dan politik internal yang tidak stabil, iklim bisnisnya kurang menguntungkan sehingga banyak investor enggan datang ke Indonesia sebelum masa pemerintahan Joko Widodo. Di sisi lain, ekonomi Indonesia didominasi oleh etnis Tionghoa yang membuat negara ini menarik bagi perusahaan multinasional dari Tiongkok. Banyak orang Tionghoa Indonesia yang masih fasih berbicara bahasa Mandarin, dan karena mereka semua dilahirkan di Indonesia, mereka mengenal segmentasi pasar dan kondisi lokal dengan sangat baik. Bahkan mereka cenderung membangun keluarga dengan etnis Tionghoa lainnya. Sejatinya perusahaan multinasional dari Tiongkok tidak memiliki insentif yang sama dengan negara-negara maju untuk melakukan manuver investasi secara bebas karena upah di Tiongkok sudah relatif rendah. Mereka cenderung berinvestasi untuk melayani pasar lokal atau mengekstraksi sumber daya yang kemudian diolah menjadi barang bernilai lebih atau biasa disebut sebagai manufaktur. Inilah cara yang menjadikan Tiongkok sebagai pusat industri manufaktur dunia. Tak

dapat dipungkiri, di beberapa sektor seperti infrastruktur dan teknologi, Tiongkok lebih maju daripada Indonesia dan investor dari Tiongkok dapat mengambil manfaat dengan menggabungkan teknologi mereka dengan sumber daya khusus yang ada pada lokasi tersebut. Perlu digaris bawahi bahwa *Bank of China* didirikan di Indonesia sejak tahun 1930-an. Baru setelah hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Indonesia dipulihkan pada tahun 1990, investasi langsung asing (FDI) dari Tiongkok mulai mengalir ke Indonesia. Mayoritas FDI dari Tiongkok dilakukan oleh perusahaan milik negara. Tetapi arus investasinya sangat terbatas akibat beberapa faktor. *Pertama*, hukum investasi di Indonesia tidak mengizinkan investasi modal asing penuh dalam beberapa aktivitas ekonomi tertentu. *Kedua*, untuk menghindari konflik dengan hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. *Ketiga*, perlunya negosiasi intensif dengan lingkungan bisnis yang memiliki ragam latar belakang di Indonesia (Gammeltoft and Tarmidi 2011, 10-14).

Indonesia dan Tiongkok memiliki hubungan yang semakin erat terlepas dari dinamika yang terjadi di masa lalu. Perdagangan merupakan pendapatan negara yang penting, namun investasi masih sangat sulit di Indonesia karena belum adanya pelonggaran regulasi. Tentunya presiden-presiden sebelumnya memiliki situasi, kondisi, dan tantangan masing-masing yang kemudian tidak memfokuskan pada lini seperti investasi dan pariwisata. Dengan momentum yang didapatkan oleh presiden Joko Widodo, diharapkan Indonesia dapat mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur dan sebagainya yang akan dijelaskan di bagian berikutnya.

BAB III

HUBUNGAN TTI INDONESIA DAN TIONGKOK PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO

3.1. Hubungan TTI Indonesia dan Tiongkok ditinjau dari teori dependensi dimana negara dibagi menjadi *center-periphery*

Pada bagian pembahasan, sebelumnya penulis telah menjelaskan terkait hubungan perdagangan, pariwisata, dan investasi antara Indonesia dan Tiongkok. Dimana ketergantungan Indonesia belum tercermin sepenuhnya. Hal ini karena beberapa faktor seperti hubungan diplomatik antara kedua negara yang baru berkembang, serta pemulihan ekonomi pasca krisis finansial Asia dan Global. Pun dalam sektor investasi misalnya, pemimpin sebelum Joko Widodo memiliki regulasi investasi yang lebih ketat. Dalam sektor pariwisata, wisatawan Tiongkok belum dijadikan sebagai prioritas dan target pasar. Walaupun dalam sektor perdagangan Tiongkok bukanlah tujuan satu-satunya. Maka dalam bab 3 ini, penulis akan menjelaskan bahwa Indonesia memiliki '*dependencia*' atau ketergantungan terhadap Tiongkok.

3.1.1 Indonesia sebagai pusat ekstraksi komoditas primer sekaligus pasar barang sekunder Tiongkok

Negara-negara periferi seringkali berperan ganda sebagai pusat ekstraksi komoditas primer dan pasar barang sekunder bagi negara-negara pusat. Sebagai pusat ekstraksi komoditas primer, negara-negara periferi memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, gas alam, logam, dan hasil pertanian. Negara-negara pusat seringkali memiliki minat ekonomi dan politik dalam mengimpor komoditas tersebut untuk memenuhi kebutuhan industri dan konsumsi mereka. Hal ini memungkinkan negara-negara periferi untuk memanfaatkan sumber daya alam mereka dan mendapatkan pendapatan dari ekspor komoditas

tersebut. Selain itu, negara-negara periferi juga berfungsi sebagai pasar barang sekunder bagi negara-negara pusat. Setelah komoditas primer diekstraksi, negara-negara periferi sering kali menjadi tujuan utama bagi negara-negara pusat dalam memasarkan dan menjual barang-barang manufaktur yang dihasilkan. Barang-barang ini mencakup produk-produk industri, elektronik, tekstil, dan lainnya. Negara-negara periferi menjadi pasar konsumen yang penting bagi negara-negara pusat, dan perdagangan barang sekunder ini memungkinkan negara-negara pusat untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan daya saing industri mereka.

Tabel 3. Komoditas ekspor antara Indonesia dan Tiongkok (2014-2016)

No	Komoditas Ekspor	Ekspor Indonesia ke Tiongkok		
		2014	2015	2016
1	Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous subs	\$5,879,990	\$4,504,692	\$5,401,003
2	Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edib	\$2,697,770	\$2,937,891	\$2,738,151
3	Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and sc	\$1,087,434	\$1,087,100	\$969,163
4	Iron and steel	\$51,567	\$300,920	\$928,527
5	Wood and articles of wood; wood charcoal	\$878,035	\$858,695	\$825,765
6	Miscellaneous chemical products	\$1,388,298	\$567,352	\$723,892
7	Ores, slag and ash	\$609,124	\$462,162	\$607,432
8	Rubber and articles thereof	\$803,068	\$507,196	\$530,230
9	Footwear, gaiters and the like; parts of such articles	\$220,443	\$311,183	\$391,623
10	Organic chemicals	\$773,209	\$345,733	\$379,276
All products		\$17,605,944	\$15,045,332	\$16,785,586

Sumber: trademap.org

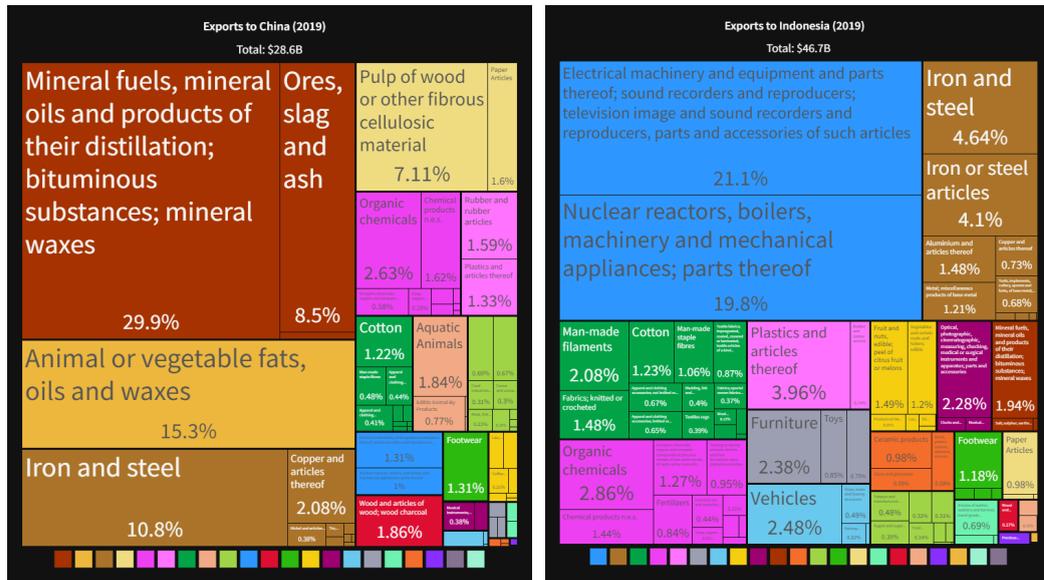
Tabel 4. Komoditas Impor antara Indonesia dan Tiongkok (2014-2016)

No	Komoditas Impor	Impor Indonesia dari Tiongkok		
		2014	2015	2016
1	Machinery, mechanical appliances, nuclear reactors, boilers; parts thereof	\$7,133,579	\$7,193,106	\$7,297,754
2	Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television ...	\$6,831,481	\$6,318,392	\$6,402,698
3	Iron and steel	\$1,809,469	\$1,984,110	\$2,099,248
4	Plastics and articles thereof	\$1,014,777	\$993,046	\$1,157,847
5	Organic chemicals	\$1,136,977	\$1,020,615	\$1,088,642
6	Articles of iron or steel	\$1,247,410	\$1,105,416	\$819,808
7	Man-made filaments; strip and the like of man-made textile materials	\$551,288	\$545,042	\$685,937
8	Inorganic chemicals; organic or inorganic compounds of precious metals, of rare-earth metals, ...	\$582,916	\$536,826	\$554,205
9	Fertilisers	\$445,200	\$605,960	\$517,994
10	Vehicles other than railway or tramway rolling stock, and parts and accessories thereof	\$526,254	\$460,351	\$517,906
All products		\$30,624,380	\$29,410,891	\$30,800,493

Sumber: trademap.org

Peningkatan ketergantungan dalam sektor perdagangan menunjukkan dependensi Indonesia terhadap Tiongkok. Hal tersebut dibuktikan dengan tabel diatas. Berdasarkan data yang diolah dari *International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC)* sepanjang tahun 2014-2016, 10 terbesar ekspor produk HS4 Indonesia ke Tiongkok sangat didominasi oleh bahan-bahan mentah. Seperti, macam mineral, hasil penyulingan, besi, baja, karet, dan ragam produk agrikultur. Pada 2016 misalnya, dari total ekspor senilai \$16 ribu ke Tiongkok, 10 komoditas HS4 yang diekspornya mencapai \$13 ribu (Tabel 3). Sedangkan 10 impor produk HS4 terbesar Indonesia adalah benda-benda olahan atau produk manufaktur yang dibuat menggunakan sumber daya yang telah diekspor. Seperti, mesin, alat elektronik, benda-benda berbahan plastik, kain tekstil, dan kendaraan (Tabel 4). Hal ini bahkan berlanjut hingga tahun-tahun setelahnya dengan peningkatan yang cukup signifikan.

Gambar 2 Komoditas ekspor antara Indonesia dan Tiongkok (2019)



Sumber: The Observatory of Economic Complexity

Merujuk pada data dari *The Observatory of Economic Complexity* per 2019, fenomena ekspor komoditas mentah berkode HS4 telah membengkak dengan menjadikan Tiongkok tujuan ekspor utama senilai USD 28 miliar (15.3% dari total ekspor USD 187 miliar) dengan hampir 50% nya masih berupa bahan mentah seperti, minyak, mineral, bahan bakar, bijih besi, dan baja. Hal ini berbanding terbalik dengan impor Indonesia ke Tiongkok berdasarkan data ekspor Tiongkok ke Indonesia yang didominasi oleh barang bernilai tambah seperti, benda-benda elektronik, peralatan mekanik, kendaraan, furnitur, dan pakaian (Gambar 1).

Dapat dilihat bahwa ketergantungan Indonesia terhadap Tiongkok semakin membengkak dari tahun ke tahun selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019. Dependensi ini berkonotasi negatif karena ekspor bahan mentah menimbulkan stagnasi surplus pendapatan ekspor. Hal ini terjadi akibat bahan mentah yang diekspor ke Tiongkok kemudian diolah menjadi produk

industri manufaktur yang memiliki nilai lebih dan dijual kembali ke Indonesia sebagai negara pasar yang memang memiliki daya konsumsi tinggi. Meningkatnya intensitas ekonomi antara keduanya tentu tak luput dari peran pemerintah yang mendukung berbagai proyek Tiongkok. Begitu pula dengan berbagai kebijakan yang dapat memudahkan akses Tiongkok untuk menjamah ranah domestik Indonesia. Dalam perspektif Beijing sendiri, kehadirannya di Indonesia yang semakin kental dapat memberikan keuntungan dan posisi strategisnya dalam konstelasi geopolitik di kawasan Asia Tenggara. Walaupun sejatinya mereka selalu menyebutkan bahwa tidak ada agenda politik yang diusahakan, secara esensial sangat terlihat jelas bahwa penetrasi Tiongkok terhadap Indonesia adalah nyata. Seperti yang Raul Prebisch nyatakan bahwa negara periferi merupakan tempat ekstraksi komoditas primer sekaligus pasar barang-barang sekunder.

Kumba Digdowiseiso dalam buku Teori pembangunan mengupas pemikiran Raul Prebisch dan memperkuat argumentasi penyebab negara-negara yang kurang berkembang selalu menghadapi kendala dalam memperoleh pendapatan yang memadai dari ekspor mereka. Yaitu, karena negara periferi terpaksa membayar harga yang lebih tinggi untuk mengimpor barang-barang yang lebih siap dari negara-negara pusat. Ada tiga hal utama yang dapat menyebabkan polemik tersebut. *Pertama*, pasar domestik negara-negara miskin tidak cukup besar untuk mendukung skala ekonomi yang digunakan oleh negara-negara maju dalam menciptakan harga yang lebih rendah. *Kedua*, dibutuhkan kemauan politik atau *political will* dari negara-negara miskin untuk melakukan transformasi dari sekadar menjadi produsen komoditas primer menjadi produsen barang bernilai

tambah yang dapat bersaing di pasar domestik dan internasional. *Ketiga*, penting juga untuk mengevaluasi sejauh mana negara-negara miskin memiliki kontrol yang sebenarnya terhadap produk utama mereka, terutama dalam hal penjualan barang tersebut di luar negeri (Digdowiseiso 2019, 32). Dalam konteks hubungan Indonesia dan Tiongkok, Indonesia adalah *market country* yang sangat besar, kemauan politik nya juga besar, namun dalam implementasinya masih dihantui oleh pengelolaan yang buruk karena kurangnya diversifikasi ataupun benturan kepentingan sepihak. Terlepas dari ketergantungan yang berdampak buruk, ada pemanfaatan yang diupayakan oleh pemerintah yang akan diulas di bagian berikutnya.

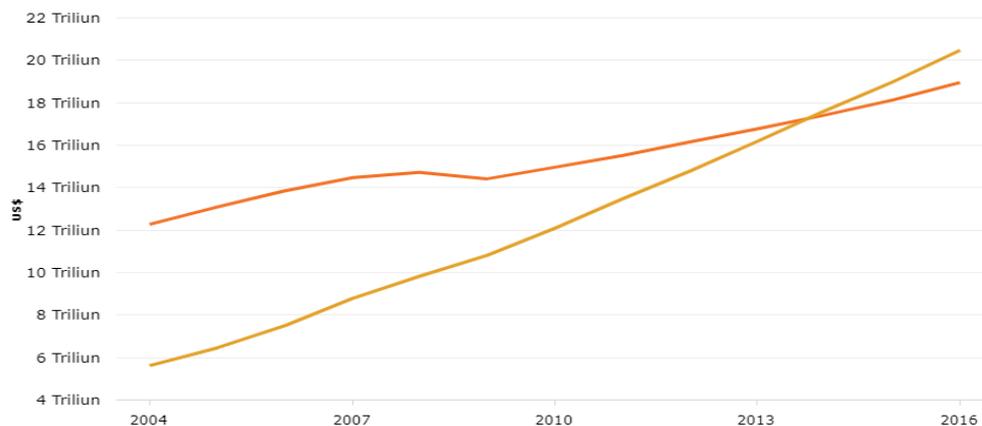
Salah satu sektor komoditas primer yang paling diminati oleh Tiongkok adalah Nikel. Tercatat pada tahun 2016, barang manufaktur berbahan nikel di Tiongkok 60% nya merupakan hasil ekstraksi dari Indonesia. Beberapa perusahaan tersebut adalah; Tsinghan, Heng Tai, Pan China Group, Brilimetal, Huadi, Hanking, Wang Xiang, Xing Xing, Guang Ching, Jiangsu Nickel Industry, dan Marconing Group. Perusahaan-perusahaan nikel asal Tiongkok memasuki Indonesia melalui kemitraan dengan perusahaan lokal atau melalui pembangunan pabrik mereka sendiri. Mereka berfokus pada produksi feronikel dan *nickel pig iron* (NPI), serta produk turunannya yang menjadi sasaran utama Tiongkok, yaitu *stainless steel* (SS). Mayoritas pabrik ini berlokasi di wilayah Sulawesi karena terdapat cadangan bijih nikel yang melimpah di daerah tersebut (Kunjana 2016).

3.1.2 Ketergantungan Indonesia akibat perkembangan teknologi oleh Tiongkok

Lain halnya dengan perkembangan di negara-negara maju yang mandiri,

perkembangan di negara dunia ketiga membutuhkan asistensi dari negara-negara maju. Namun, perkembangan teknologi oleh negara-negara pusat sering kali menyebabkan ketergantungan yang lebih besar bagi negara-negara periferi. Teknologi canggih dan inovasi yang dimiliki oleh negara-negara pusat dapat mengubah struktur industri dan mempengaruhi persaingan global. Negara-negara periferi seringkali memiliki akses terbatas terhadap teknologi dan sumber daya manusia yang terampil, sehingga sulit bagi mereka untuk mengadopsi dan mengembangkan teknologi yang sama. Hal ini dapat menyebabkan ketergantungan negara periferi terhadap impor barang dan jasa teknologi dari negara-negara pusat, yang dapat meningkatkan neraca perdagangan dan membatasi potensi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang.

Grafik 1

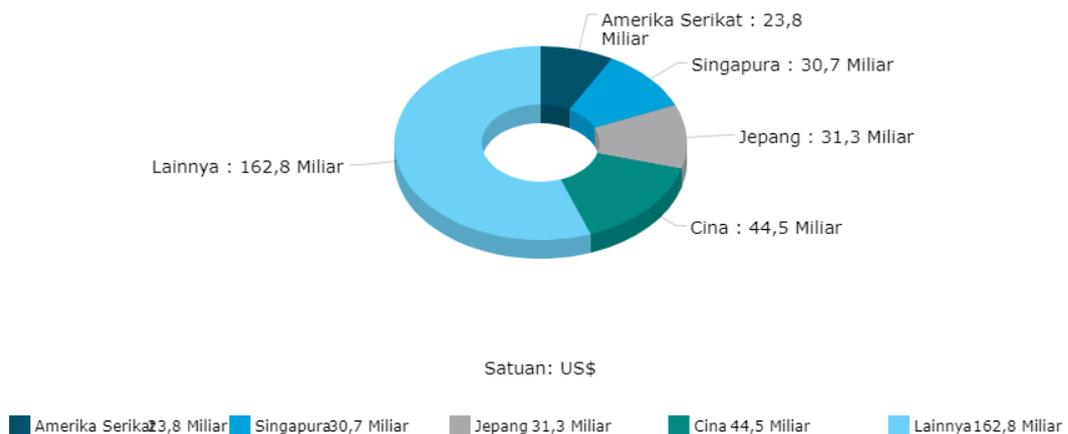


Sumber: *International Monetary Fund (IMF)*, 2015

Keberadaan Tiongkok dalam atmosfer multisektoral domestik Indonesia dapat dilihat dengan jelas jika merujuk kepada data. Pada tahun 2014, perhitungan data dari IMF menyatakan bahwa Tiongkok berhasil menyusul ekonomi terbesar

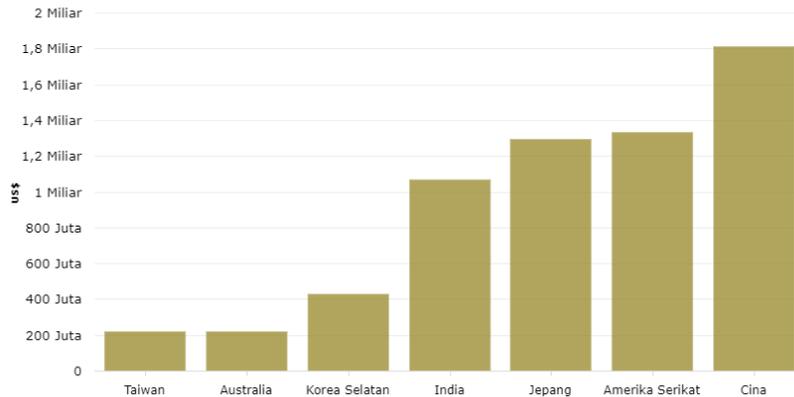
di dunia, Amerika berdasarkan PDB menurut daya beli senilai USD 17,6 Triliun dimana Amerika memiliki GDP-PPP senilai USD 17,4 Triliun (Grafik 1). Melihat kekuatan yang tak terelakkan tersebut, Indonesia tentu tidak tinggal diam. Presiden terpilih, Joko Widodo dengan sigap merespons dengan komitmennya terhadap berbagai proyek Tiongkok, seperti proyek BRI, pencaangan AIIB, bahkan melakukan lawatan ke Beijing pada permulaan tahun 2015 sebagai tindak lanjut pemberdayaan MP3EI dalam liberalisasi pasar antara keduanya. Hal ini dilakukan dalam rangka mempererat hubungan dengan Tiongkok.

Grafik 2



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2016

Grafik 3



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2016

Ini kemudian dibuktikan dengan nilai transaksi perdagangan Indonesia dengan Tiongkok menembus angka Rp 613 triliun dengan kurs Rp 13.795 per dolar Amerika yang setara dengan USD 44,5 miliar pada tahun 2015, menyusul Jepang, Singapura, dan Amerika pada tahun 2015 (Grafik 2). Walaupun nilai ekspor ke Tiongkok sempat menurun pada tahun 2014-2015, Tiongkok tetap menjadi negara tujuan ekspor utama Indonesia pada tahun 2016 mencapai USD 1,8 miliar melampaui Amerika (USD 1,33 miliar), Jepang (USD 1,29 miliar), dan India (USD 1,1 miliar) (Grafik 3). Dalam artian, Tiongkok telah dianggap sebagai mitra dagang strategis bagi Indonesia.

Melihat laporan dari bank dunia yang menggarisbawahi kurangnya investasi dalam sektor infrastruktur. Presiden Joko Widodo lantas memfokuskan periode pemerintahannya dalam pembangunan, khususnya daerah-daerah pinggiran. Dilema pembangunan infrastruktur di Indonesia merupakan fenomena yang nyata. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur adalah perlu untuk memajukan rantai pasokan baik di perkotaan maupun pinggiran. Namun, pengelolaan yang buruk dapat menghasilkan dampak negatif yang berkelanjutan.

Mengutip pernyataan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani bahwa kualitas dari pembangunan infrastruktur yang bertarget adalah kunci dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peran investor khususnya asing sangatlah penting untuk menopang sinergi dengan BUMN dan swasta. Pembukaan pintu investasi selebar-lebarnya menjadi jawaban. Menimbang laporan dari *World Economic Forum* 2014, bahwa Indonesia memiliki kualitas infrastruktur yang jauh dari kata mumpuni, yaitu ke-72 dari total 144 negara survey. Penyebab utama dari buruknya kualitas infrastruktur di Indonesia adalah tingginya *cost* atau biaya logistik. Hal ini karena geografi Indonesia yang berbentuk pulau-pulau dengan topografi yang begitu rumit dan beragam. Pemerataan infrastruktur juga masih menjadi masalah pada masa-masa sebelumnya yang terlalu tersentralisasi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2015).

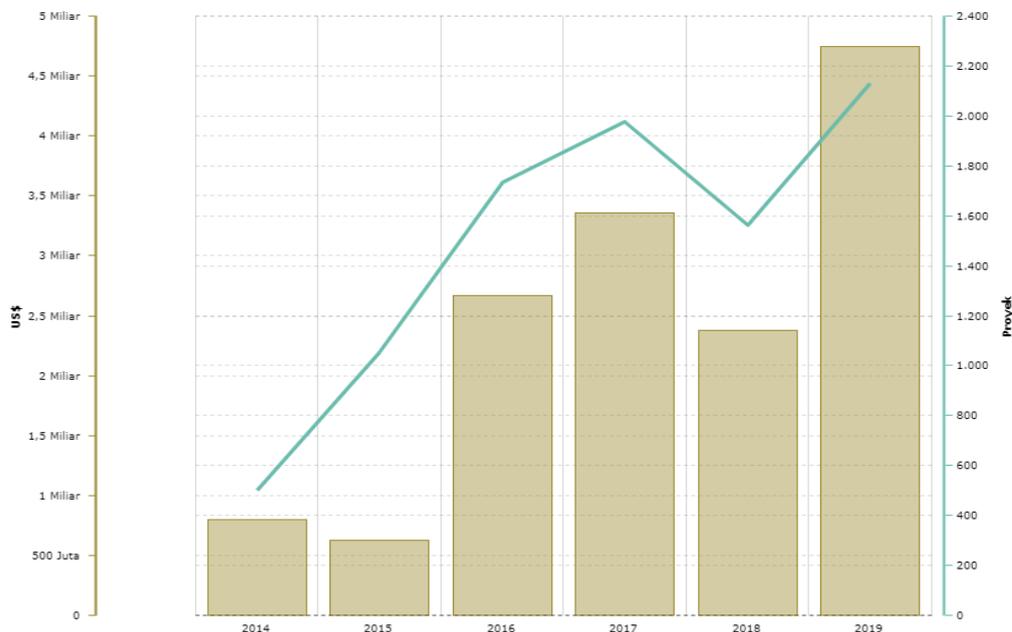
Usaha realisasi investasi infrastruktur dapat didasari oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019). Presiden Joko Widodo memperkenalkan visi-misi yang disebut dengan Nawacita. Nawacita sendiri merupakan transformasi dari konsep Trisakti Soekarno di era 65-67. Perubahan dari Trisakti ke Nawacita sebagai sebuah konsep bertujuan untuk membangun kembali dasar pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar, terutama pemerataan. Konsep Trisakti terdiri dari tiga pilar, yaitu kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian budaya. Kemudian, konsep ini diperluas menjadi Nawacita yang terdiri dari 31 program yang dibagi dalam tiga bidang, yaitu kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian budaya, dengan sembilan program prioritas utama. Yaitu:

1. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara
2. Akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
4. Akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
6. Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Akan melakukan revolusi karakter bangsa
9. Akan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Dalam upaya pembangunan daerah, Jokowi menunjukkan komitmennya yang sejalan dengan poin ketiga Nawacita, yaitu "membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan." Jokowi mengakui bahwa pembangunan di wilayah pinggiran masih minim, akibat fokus pembangunan yang berfokus pada pusat dan daerah perkotaan sebagai pusat pertumbuhan di era sebelumnya. Semangat pembangunan daerah pinggiran yang terlihat tidak hanya bermaksud untuk pemerataan, tetapi juga untuk mengurangi biaya distribusi barang di daerah tersebut. Dengan

demikian, biaya distribusi dapat menjadi lebih murah dan efisien. Komitmen Jokowi dalam membangun dari pinggiran lebih menekankan pembangunan di kawasan perbatasan, mengingat kawasan perbatasan sendiri belum mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah pusat. Meskipun kawasan perbatasan memiliki posisi strategis secara geopolitik dan sebagian besar terletak di wilayah Timur Indonesia, upaya pembangunan yang seimbang diperlukan untuk mencegah ketimpangan dan kesenjangan pembangunan antara kawasan timur dan barat. Oleh karena itu, pembangunan daerah perbatasan juga menjadi perhatian pemerintah melalui program aksi Nawacita, sekaligus menjadi kebalikan dari pola pembangunan pada periode pemerintahan sebelumnya (Soleman and Noer 2017, 1970).

Grafik 4



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2020

Untuk merealisasikan program-program yang dicanangkan dalam RPJMN 2015-2019, Indonesia membutuhkan dana sebesar 6.780 triliun rupiah dengan

financial gap yang masih tinggi, yaitu di angka 4.000 triliun rupiah. Tak dapat dipungkiri, kedekatan Indonesia dengan Tiongkok menjadikannya mitra investasi strategis. Grafik diatas menunjukkan bahwa selama pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019, nilai proyek investasi Tiongkok di Indonesia mengalami tren peningkatan pada empat tahun pertama dari \$800 juta pada tahun 2014 melalui total 501 proyek, menjadi \$3,9 miliar pada tahun 2017 dengan total 1.997 proyek. Walaupun sempat turun \$1 miliar di tahun 2018, terjadi peningkatan pada akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan nilai investasi sebesar \$4,7 miliar melalui 2.130 proyek. Ini menempatkan Tiongkok pada peringkat kedua investor terbesar di Indonesia (Jayani 2020). Bagi pemerintah Indonesia, hal ini merupakan lampu hijau perekonomian dalam negeri. Karena, Tiongkok berkontribusi pada realisasi investasi Indonesia setiap tahunnya. Hingga pada tahun 2019 dapat melebihi target awal sebesar 792 triliun rupiah menjadi 809,6 triliun rupiah dan merupakan peningkatan sebesar 48,4% selama 5 tahun (2015-2019). Tercatat penanaman modal asing (PMA) melalui *foreign direct investment* (FDI) merupakan kontributor terbesar sebanyak 423,1 triliun (Jayani 2020).

Menilik pada kehadiran Tiongkok dalam berbagai pembangunan di Indonesia, proyek BRI merupakan contoh yang cocok dalam menggambarkan dasarnya investasi Tiongkok. Salah satu tujuan utama proyek BRI adalah membangun berbagai fasilitas untuk memudahkan mobilitas. Seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, pembangkit listrik, dan yang paling identik dengan proyek Tiongkok adalah '*High Speed Rail*' (HSR) atau Kereta Api Cepat. Beberapa investasi infrastruktur yang telah dibangun adalah, pembangunan

Tol Manado-Bitung (2016-2019), Tol Cileunyi-Sumedang Dawuan seksi I dan II (2016-2019), Tol Solo-Kertosono (2015-2017), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pulang Pisang di Kalimantan (2016), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Riau (2015-2017) pemasangan rel LRT sepanjang 46,8 km bersama China Harbour, dan beberapa proyek di Sumatera Utara. Kereta Api Cepat sendiri merupakan proyek ambisius yang penuh dengan kontestasi asing. Bermula dari inisiasi kerjasama bersama Jepang, pemerintah Indonesia mendapati hasil negosiasi yang kurang memuaskan. Hal ini karena kehadiran Tiongkok di meja diplomasi yang memiliki tawaran lebih. Selain memberikan pinjaman dan penyediaan bahan baku, pemerintah Indonesia dijanjikan untuk tidak akan terbebani dengan APBN dalam proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung tersebut. Melainkan menggunakan skema *business to business* yang terjalin antara perusahaan kereta api Tiongkok 'China Railway International Co.Ltd dengan BUMN Indonesia yang dinaungi langsung oleh pemerintah. Ini komplementer dengan apa yang dikenal dengan skema *Public Private Partnership*. Dimana, pada dasarnya merupakan peningkatan daya infrastruktur serta pengerjaan konstruksi berdasarkan *project financing principal*. Yaitu, sponsor dari suatu proyek infrastruktur memiliki tugas dari merancang, membangun, hingga merawat infrastruktur tersebut dengan imbalan hak konsesi pengelolaan sarana infrastruktur dalam kurun waktu tertentu. Ketika waktu hak konsesi habis, pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil secara penuh infrastruktur tersebut. Tentu saja tawaran menggiurkan ini memiliki *bargaining power* yang lebih kuat daripada tawaran lainnya. Negosiasi pembangunan rel sepanjang 142,3 km ini pun dimenangkan oleh Tiongkok (Yamin and Windymadaksa 2018, 1-18).

AIIB juga memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sejak pendiriannya pada tahun 2016, Indonesia telah menjadi salah satu pemilik saham terbesar di AIIB. Pada saat operasional AIIB dimulai, Indonesia menjadi salah satu penerima pendanaan awal bersama dengan tiga negara lainnya. Beberapa investasi yang telah ditanamkan oleh AIIB di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo Kabinet Kerja I adalah, *Indonesia: National Slum Upgrading Project* (\$216.5 Juta), *Indonesia: Regional Infrastructure Development Fund* (\$100 Juta), *Indonesia: Dam Operational Improvement and Safety Project Phase II* (\$125 Juta), *Indonesia: Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* \$250 Juta), *Indonesia: Mandalika Urban and Tourism Infrastructure* (\$248.4 Juta) (AIIB, n.d.). Tentunya, terwujudnya bantuan berbentuk penanaman modal asing atau pembangunan infrastruktur tersebut tak luput dari kebijakan pemerintah yang berusaha untuk komplementer dengan kepentingan asing. Penganjutan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I pada 9 September 2015 berperan penting dalam debirokratisasi dan deregulasi yang diharapkan mempercepat realisasi bantuan yang sebelumnya dianggap menghambat (Wibowo 2017, 63). Menilik perkembangannya melalui Paket Kebijakan Ekonomi tahap XVI pada tahun 2019, penganjutan konsep *'tax holiday'* merupakan lampu hijau pembukaan keran investasi asing ke Indonesia. Secara garis besar, pemerintah memberikan pembebasan pajak penghasilan (PPh) pada investor asing baik bersumber dari usaha tetap di Indonesia maupun diperoleh dari penghasilan dalam negeri yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 serta penyempurnaannya dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 130/ PMK.011/ 2011. Karena dianggap terlalu

luas dan belum tepat sasaran, peraturan tersebut kemudian diperbaharui melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 159/ PMK.010/ 2015 yang pada 2018 diterbitkan kembali oleh Menkeu Sri Mulyani melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 150/ PMK.010/2018. Pemerintah secara berkala merelaksasi investasi dalam beberapa sektor atau dikenal dengan Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk mengerucutkan segmentasi khususnya pada pelaku Usaha Menengah Mikro Kecil (UMKM). Sejatinya, kebijakan ini berupaya untuk mengklasifikasi UMKM di Indonesia lebih lanjut agar setiap pelaku usaha dapat menikmati akses investor yang adil, merata, dan tepat sasaran. Namun, secara praktek dianggap berbuah sebaliknya dan merugikan pelaku UMKM karena kebijakan tersebut memungkinkan asing untuk mendapatkan kepemilikan 100% diiringi dengan perancangan kebijakan yang eksplisit terkait penentuan sektor yang dibuka. Bahaya yang ditimbulkan akan sangat krusial dalam kemunduran demokrasi karena pengambilan keputusan tidak melalui mufakat bersama. Pelaku UMKM tidak diberikan akses untuk berargumentasi dan merancang kebijakan. Alhasil, kebijakan yang dicanangkan mencampakkan rakyat karena bertindak untuk kepentingan sepihak. Pemerintah dianggap terlalu condong pada para pemilik modal karena membuka saham seluas-luasnya. Walaupun pengurangan hambatan investasi bertujuan untuk menarik investor asing, jika disahkan secara sepihak maka akan menjadi ancaman bagi buruh dalam negeri (Paulus, Erawan, and Mahaswari 2020, 6-8).

Dalam ranah TTI, Perkembangan sektor pariwisata Indonesia juga memiliki peran besar dari Tiongkok. Selain merupakan salah satu negara dengan

wisatawan terbanyak, investor asing dari Tiongkok merupakan mitra strategis yang sangat diharapkan oleh pemerintah Indonesia.

Tabel 5. Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia (2016-2018)

Kebangsaan	Tahun		
	2016	2017	2018
Tiongkok	1,556,771	2,093,171	2,139,161
Malaysia	1,541,197	2,121,888	2,503,344
Singapura	1,515,699	1,554,119	1,768,744
Australia	1,302,292	1,256,927	1,301,478
Jepang	545,392	573,310	530,573

Sumber: bps.go.id

Walaupun memiliki letak geografis yang tidak berdekatan, wisatawan Tiongkok merupakan salah satu yang terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Tiongkok, Malaysia, Singapura, Australia, dan Jepang merupakan wisatawan mancanegara terbanyak yang mengunjungi Indonesia (Tabel 5). Sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia, ditambah kaliber ekonomi dan daya beli masyarakat yang pesat dalam beberapa dekade terakhir, Tiongkok menjadi potensi pasar wisatawan yang sangat besar. Wisatawan Tiongkok mampu melakukan perjalanan ke luar negeri. Begitupun Indonesia, dengan kemitraan serta fasilitas perjalanan yang telah dikembangkan sejak lama, keduanya saling mempromosikan pariwisata masing-masing. Menteri Pariwisata Arief Yahya menegaskan bahwa wisatawan Tiongkok merupakan target utama capaian pariwisata Indonesia *“Kami sendiri telah menetapkan target untuk menarik 20 juta wisatawan pada 2019 dan hampir 50 persennya berasal dari China...”*. Ungkapnya, hal ini dapat dicapai dengan mengusahakan konsep *‘Grand China’* yang merupakan sebutan bagi Tiongkok, Hong Kong dan Taiwan

serta membuka keran investasi jangka panjang di sektor pariwisata ke investor-investor Tiongkok (Tempo 2016).

Investasi tersebut dibutuhkan karena beberapa faktor yang masih harus ditingkatkan dalam sektor pariwisata Indonesia. Terlepas dari kontribusi 6% dari total ekspor, Indonesia merupakan negara dengan kebijakan visa kedua terkuat di dunia menurut laporan dari *World Economic Forum* (WEF) pada tahun 2017. Tetapi, dalam belum tegak lurus dengan acuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) karena perlindungan lingkungan yang masih di peringkat 131 dari 140 negara telapor. Sebagai habitat dari ragam flora dan fauna yang juga merupakan instrumen pariwisata, pembuangan limbah liar (peringkat ke-109) dan deforestasi masih menjadi masalah yang sangat besar (peringkat ke-113). Hal ini berimplikasi pada potensi kepunahan spesies langka (peringkat ke-127) di Indonesia. Infrastruktur juga merupakan kelemahan lainnya, menurut laporan tersebut Indonesia masih harus meningkatkan potensinya terkhusus pada sektor pariwisata (peringkat ke-96). Kunci untuk sukses sektor di sektor pariwisata di masa depan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah mengintegrasikan pembangunan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan. Dengan hadirnya Tiongkok, diharapkan Indonesia dapat menutupi kekurangan-kekurangan tersebut dan memberi ruang lebih bagi kontribusi pendapatan negara melalui sektor pariwisata (World Economic Forum 2017, 24).

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Hubungan Internasional merupakan dinamika yang kompleks. Indonesia dengan politik luar negeri bebas-aktif nya telah eksis dan bertahan seiring berkembangnya zaman. Namun, kebangkitan Tiongkok melalui fenomena '*rising China*' menjadi kekuatan global baru yang tidak terelakkan. Relasi yang fluktuatif sejak kemerdekaan Beijing oleh revolusioner komunis Mao Zedong pada tahun 1947 kemudian mencapai masa perkembangan pasca pemerintahan orde baru di Indonesia. Tren positif hubungan Indonesia-Tiongkok, terutama di bidang ekonomi diwarisi kepada Presiden terpilih Joko Widodo pada tahun 2014. Berlatarkan lingkungan yang populis dan berorientasi pada sektor ekonomi, arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita tidak lagi memprioritaskan kebijakan kemanusiaan atau penanaman citra positif Indonesia dalam ranah Internasional seperti sebelumnya. Tetapi, mulai masuk kepada perluasan perkembangan ekonomi dan infrastruktur. Tiongkok hadir sebagai mitra strategis utama Indonesia. Baik dari segi investasi maupun perdagangan (ekspor-impor), Tiongkok selalu menjadi yang tertinggi dari negara-negara lainnya bagi Indonesia dan cenderung mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Ini membuktikan bagaimana kedua negara telah berkomitmen dalam menciptakan kemitraan strategis yang erat, khususnya dalam sektor ekonomi.

Dengan kerangka dependensi Raul Prebisch yang dikenal dengan konsep *center-periphery*, Indonesia merupakan pusat ekstraksi komoditas primer

sekaligus pasar barang sekunder bagi Tiongkok. Hal ini dapat dilihat dari timpangnya neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok dan ekspor komoditas Indonesia sangat didominasi oleh bahan-bahan mentah. Sedangkan dalam sektor impor, Indonesia mengimpor barang-barang manufaktur dari Tiongkok yang bahan industrinya merupakan hasil ekstraksi dari Indonesia. Disamping hal itu, Indonesia memang mengalami pertumbuhan baik di sektor TTI. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan-pembangunan masif baik yang didukung oleh BRI maupun AIIB yang terjadi pada masa pemerintahan Joko Widodo sepanjang tahun 2014-2019. Sektor pariwisata Indonesia juga naik peringkat dunia secara signifikan. Relaksasi investasi yang dicanangkan dalam beberapa tahap mengakibatkan mudahnya investor untuk masuk ke Indonesia. Terlepas dari transfer teknologi yang tidak maksimal, Indonesia mengalami perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, perkembangan tersebut dapat lebih signifikan jika Indonesia mau lebih mendiversifikasikan sektor ekspor-impor dan sumber investasinya. Selain fokus pada pembangunan di pinggiran Indonesia sebagai penghapus hambatan mobilitas ekonomi, menciptakan atmosfer manufaktur yang mandiri dapat menghapus stagnasi perkembangan Indonesia dan lepas dari ketergantungan terhadap Tiongkok.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai Kerja Sama Indonesia dengan Tiongkok dalam TTI (Perdagangan, Pariwisata, Investasi) di Era Pemerintahan Joko Widodo 2014-2019, penulis merasa bahwa masih banyak hal yang dapat dikembangkan dari penelitian ini. Sehingga penulis akan memberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan berguna bagi penelitian selanjutnya:

1. Presiden Joko Widodo telah berlanjut ke periode 2019-2024, dimana intensifikasi hubungan antara kedua negara telah meningkat dengan drastis. Berbagai proyek Tiongkok di Indonesia juga menunjukkan indikasi dependensi di tengah dinamikanya yang kontroversial. Penulis selanjutnya bisa menganalisis hubungan Indonesia dengan Tiongkok pada masa Kabinet Kerja II (2019-2024)
2. Penulis juga merekomendasikan untuk penelitian lebih lanjut mengenai hubungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok, namun menggunakan teori, konsep, atau pendekatan yang berbeda. Seperti analisis hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok ditinjau dari konsep '*resource curse*' atau menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci, ataupun menggunakan teori dependensi dari pemikir yang mengembangkannya seperti Andre Gunder Frank dengan *satellite-metropol state*, Immanuel Wallerstein dengan *world system theory*, Johan Galtung dengan *structural imperialism*, dan Samir Amin dengan *unequal exchange concept*.
3. Penulis sangat merekomendasikan untuk penelitian lebih lanjut mengenai pembangunan-pembangunan Tiongkok di Indonesia secara spesifik, seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan pembangkit listrik.

DAFTAR PUSTAKA

- AIIB. n.d. "AIIB Projects Status." AIIB. Accessed October 24, 2022.
https://www.aiib.org/en/projects/list/year/All/member/Indonesia/sector/All/financing_type/All/status/All.
- Andika, Muhammad T., and Allya N. Aisyah. 2017. "Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan?" *Indonesian Perspective* Vol. 2, no. No. 2 (Desember): 161-179. doi:10.14710/ip.v2i2.18477.
- Anggraeni, Tyas D. 2015. "Menyambut Kelahiran Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)." *Jurnal RechtsVinding Online*.
- Anwar, Dewi F. 2019. "Indonesia-China Relations: To Be Handled With Care." *ISEAS-Yusof Ishak Institute: Perspective* 19:1-7. ISSN 2335-6677.
- Badan Pusat Statistik. 2016. "2015, Perdagangan Indonesia-Cina Capai 15 Persen." Databoks.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/07/2015-perdagangan-indonesia-cina-capai-15-persen>.
- Badan Pusat Statistik. 2016. "Ekspor Indonesia ke Cina Kalahkan Amerika Serikat." Databoks.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/27/ekspor-indonesia-k-e-cina-kalahkan-amerika-serikat>.
- Baer, Werner. 1962. "The Economics of Prebisch and ECLA." *Economic Development and Cultural Change* 10, no. 2 (January): 169-182.
<https://www.jstor.org/stable/1151909>.

- BPK. 1993. “KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA RELATING TO SCHEDULED AIR TRANSPOR.” Peraturan BPK.
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/53476/Keputusan_Presiden_no_116%20TH%201993.pdf.
- BPS. n.d. “Badan Pusat Statistik.” Badan Pusat Statistik. Accessed May 12, 2023.
<https://www.bps.go.id/indicator/16/351/2/jumlah-kunjungan-wisatawan-manca-negara-ke-indonesia-menurut-kebangsaan-2000-2014.html>.
- Bunghez, Corina L. 2016. “The Importance of Tourism to a Destination's Economy.” *Journal of Eastern Europe Research in Business & Economics* 2016 (January): 1-9. DOI: 10.5171/2016.143495.
- Cipto, Bambang. 2018. *Strategi China Merebut Status Super Power*. 1st ed. N.p.: Pustaka Pelajar.
- Digdowiseiso, Kumba. 2019. *Teori Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional. ISBN : 978-623-7376-40-8.
- Edelstein, Joel C. 1981. “Dependency: A Special Theory within Marxian Analysis.” *Latin American Perspectives* 8, no. 3/4 (Late Summer - Autumn): 103-107. <https://www.jstor.org/stable/2633472>.
- Embassy of PRC in Indonesia. 2004. “China and Indonesia.” *Sekilas Hubungan Bilateral*. <http://id.china-embassy.gov.cn/indo/zgyyn/sbgxgk/>.
- Fitriani, Evi. 2021. “Linking the impacts of perception, domestic politics, economic engagements, and the international environment on bilateral

relations between Indonesia and China in the onset of the 21st century Evi Fitriani.” *JOURNAL OF CONTEMPORARY EAST ASIA STUDIES* 10, no. 2 (September): 183-202.

<https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1955437>© 2021 The Author(s).

Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

Gammeltoft, Peter, and Lepi T. Tarmidi. 2011. “Chinese Foreign Direct Investment in Indonesia.” *CIBEM Working Paper Series*, (November), 1-29. <https://core.ac.uk/download/pdf/17278758.pdf>.

Hamilton-Hart, Natasha, and Dave McRae. 2015. “Indonesia: Balancing The United States and China, Aiming for Independence.” *United States Studies Centre*, (November), 1-33. <https://www.usindo.org/assets/up/2015/12/Indonesia-Balancing-US-and-China-November-2015-MacArthur-Indonesia-ONLINE.pdf>.

International Monetary Fund. 2016. “Cina Salip Ekonomi Amerika Pada 2014.” Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/03/cina-salip-ekonomi-amerika-pada-2014>.

International Trade Centre. n.d. “Trade Statistics for International Business Development.” Trade Map. Accessed January 10, 2023. https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c360%7c%7c156%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1.

- Jayani, Dwi H. 2020. "Realisasi Investasi Indonesia 2019 Naik 48,4% dalam 5 Tahun." Databoks.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/29/realisasi-investasi-indonesia-2019-naik-484-dalam-5-tahun>.
- Jayani, Dwi H. 2020. "Nilai Investasi Tiongkok ke Indonesia Naik ke Peringkat 2." Databoks.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/04/nilai-investasi-tiongkok-ke-indonesia-naik-ke-peringkat-2>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. "Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas sebagai Salah Satu Kunci Utama dalam Mengejar Pertumbuhan Ekonomi." Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/7837/Pembangunan-Infrastruktur-yang-Berkualitas-sebagai-Salah-Satu-Kunci-Utama-dalam-Mengejar-Pertumbuhan-Ekonomi.html>.
- Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2015. *LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2015-2019*. N.p.: KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
<https://djsn.go.id/storage/app/media/RPJM/BUKU%20I%20RPJMN%202015-2019.pdf>.
- Kissinger, Henry A. 2017. *Lee Kuan Yew: Master Berpengetahuan Luas Tentang Tiongkok, Amerika Serikat, dan Dunia*. N.p.: PT ELEX MEDIA KOPUTINDO.

- Kunjana, Gora. 2016. "Tiongkok Bangun Pabrik Nikel US\$ 22 Miliar di Indonesia." *Investor Daily*.
<https://investor.id/industry-trade/154282/tiongkok-bangun-pabrik-nikel-us-22-miliar-di-indonesia>.
- Love, Joseph L. 1980. "Raul Prebisch and the Origins of the Doctrine of Unequal Exchange." *Latin American Research Review* 15 (3): 45-72.
<https://www.jstor.org/stable/2502991>.
- Myint, H. 1958. "The "Classical Theory" of International Trade and the Underdeveloped Countries." *The Economic Journal* 68, no. 270 (June): 317-337. <https://www.jstor.org/stable/2227598>.
- The Observatory of Economic Complexity. n.d. "Indonesia Yearly Trade." OEC.
<https://oec.world/en/profile/country/idn?yearSelector1=2019&depthSelector1=HS2Depth>.
- OECD. 2015. "Investment: Upgrading Indonesia's Infrastructure." *Indonesia Policy Brief*, (March).
<https://www.oecd.org/indonesia/indonesia-investment-upgrading-infrastructure.pdf>.
- OECD. 2016. "Investment: Improving Indonesia's Investment Climate." *Indonesia Policy Brief*, (October).
<https://www.oecd.org/indonesia/indonesia-improving-investment-climate.pdf>.
- O'Sullivan, Patrick. 1985. "Determinants and Impact of Private Foreign Direct Investment in Host Countries." *Management International Review* 25, no. 4 (4th Quarter): 28-35. <https://www.jstor.org/stable/40227769>.

Paulus, Hosea S., I Ketut P. Erawan, and Mirah Mahaswari. 2020. "Analisis Pengaruh Paket Kebijakan Ekonomi XVI terhadap Peningkatan Investasi di Indonesia Tahun 2019." *Jurnal Nawala Politika* 1, no. 2 (July): 1-13. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/article/view/61969>.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 2014. "MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011 - 2025." No. 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/66160/Perpres%20Nomor%20048%20Tahun%202014%20-%20BAB%20I%20%20-%20file%201.pdf>.

Qomara, Grienda. 2015. "Kebangkitan Tiongkok dan Relevansinya terhadap Indonesia." *Jurnal Hubungan Internasional* □ Tahun VIII, No.2, (Juli): 31-44. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jhi84ad88b541full.pdf>.

Rosenzweig, Mark R., and Kurt Pawlik, eds. 2000. *The International Handbook of Psychology*. N.p.: SAGE Publications. <https://alingavreliuc.files.wordpress.com/2010/10/pawlik-rosenzweig-handbook-of-psychology.pdf>.

Soleman, Mochdar, and Mohammad Noer. 2017. "NAWACITA SEBAGAI STRATEGI KHUSUS JOKOWI PERIODE OKTOBER 2014-20 OKTOBER 2015." *POLITIK: Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan* 13 (1): 1961-1975. <https://media.neliti.com/media/publications/126198-ID-nawacita-sebagai-strategi-khusus-jokowi.pdf>.

- Tempo. 2016. "Indonesia, China Agree to Check Unprofessional Tourism Operators." Tempo.co English.
<https://en.tempco.co/read/819878/indonesia-china-agree-to-check-unprofessional-tourism-operators>.
- Wibowo, Agung. 2017. "REAKSI INVESTOR PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PAKET KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP I JOKOWI–JK (Studi pada Saham LQ 45 Periode Agustus 2015–Pebruari 2016)." *MEDIA EKONOMI DAN MANAJEMEN* 32, no. 1 (January): 58-70.
<http://dx.doi.org/10.24856/mem.v32i1.452>.
- WITS. n.d. "Indonesia trade balance, exports, imports by country 2013 | WITS Data." World Integrated Trade Solution (WITS). Accessed May 11, 2023.
<https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/IDN/Year/2013/TradeFlow/EXPIMP/Partner/by-country>.
- World Bank. 2014. "Indonesia: Avoiding The Trap." *Development Policy Review 2014*, (May), 1-158.
<https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/EAP/Indonesia/Indonesia-development-policy-review-2014-english.pdf>.
- World Economic Forum. 2017. "The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017." *Insight Report*, 1-370. ISBN-13: 978-1-944835-08-8.
- Yamin, Muhammad, and Shellia Windymadaksa. 2018. "Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sebagai Mercusuar Hubungan Indonesia-Tionggok." (July), 1-19. DOI: 10.24252/jpp.v5i2.4345.

